



پهريمانه كابلان لوماڄان

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA PD

2024-2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ini merupakan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

RENSTRA ini sebagai pedoman dan arah pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai pada periode 2024-2026. RENSTRA merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (RENJA); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); serta (5) Rencana/ Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Lainnya.

Kami sadar bahwa di dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lumajang.

Dan akhirnya, semoga semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 3 (Tiga) tahun ke depan lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna.

Lumajang, 2 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.SI, M.T
NIP. 19810817 201001 1 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Tugas	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3. Struktur Organisasi	9
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	33
2.2.1. Susunan Kepegawaian	33
2.2.2. Aset.....	35
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	45
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	45
2.6. Kerjasama Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2. Isu Strategis	48
BAB VI TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1. Tujuan dan Sasaran	49
4.2. Cascading Perangkat Daerah.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	115
7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026	115
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	118
BAB VIII PENUTUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	33
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan.....	34
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	34
Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	35
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Tetap TA 2022.....	35
Tabel 2. 9 Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal.....	37
Tabel 2. 10 T-C 23.....	39
Tabel 2. 11 T-C 24.....	45
Tabel 3. 1 TB 35.....	47
Tabel 4. 1 TC 25.....	50
Tabel 4. 2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	54
Tabel 5. 1 TC 26.....	82
Tabel 6. 1 TC 27.....	84
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	116
Tabel 7. 2 TC 28.....	119

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dalam hal ini Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam masa transisi hingga Bupati dan Wakil Bupati Lumajang akan ditetapkan kemudian. Di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari OPD selama 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga Renstra PD ini merupakan acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan di lingkup urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sedangkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang harus mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Jawa Timur harus sesuai dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum yang tertuang dalam Renstra Nasional dengan tak lupa mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
34. Peraturan Bupati Lumajang No. 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

35. Peraturan Bupati Lumajang No.26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024 - 2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang infrastruktur.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tantangan dan perkembangan pada masa mendatang;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 2. Sumberdaya Perangkat Daerah
 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 4. Kelompok Sasaran Layanan
 5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 6. Kerjasama Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 2. Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan dan Sasaran
 2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
 2. Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB VIII : PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II

GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang pertanahan serta adanya Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/47/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

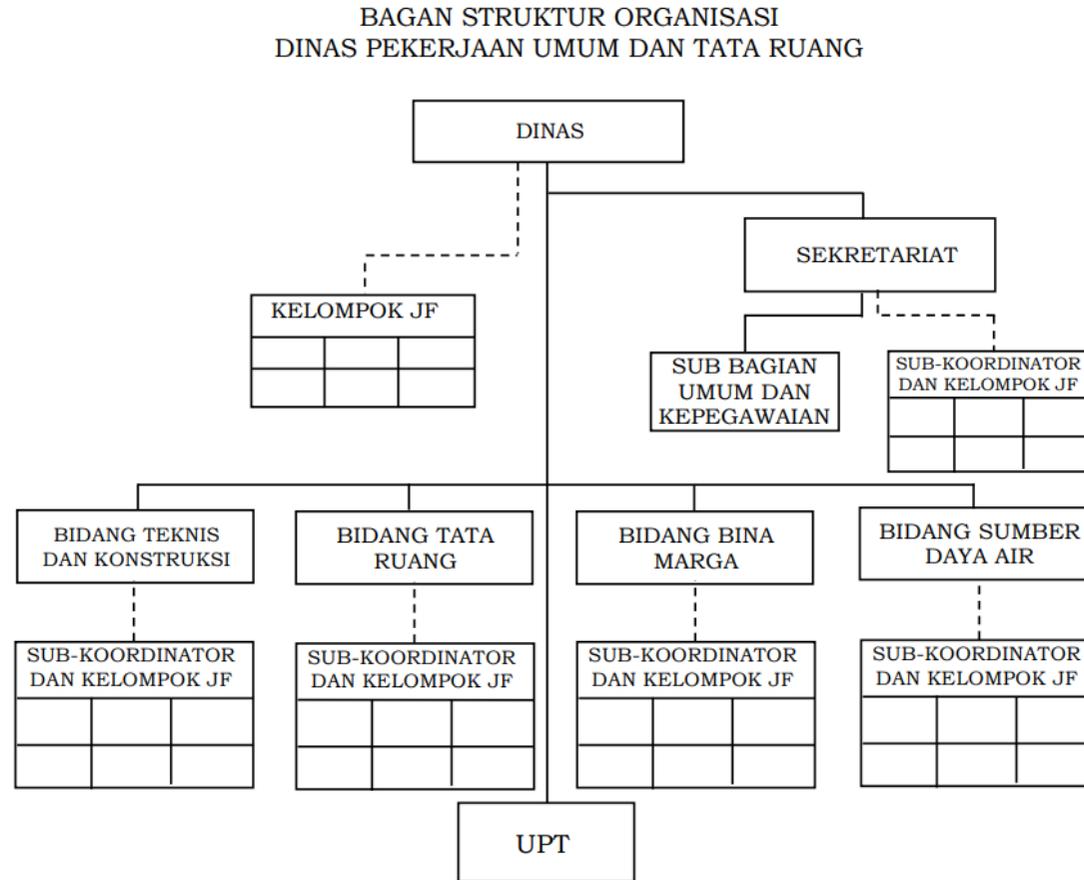
2.1.3.Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Teknis dan Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - b. Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Dengan uraian sebagai berikut :

2.1.3.1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang pertanahan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

2.1.3.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

- b. Pengoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, Renstra, RPJMD, dsb);
- c. Pengoordinasian evaluasi program;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai;
- h. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- j. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- k. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- l. Pengelolaan barang/kekayaan Milik Daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a) Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b) Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d) Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan dalam pegawai;
- e) Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
- f) Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- g) Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h) Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i) Pengembangan sistem informasi;
- j) Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- k) Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- l) Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- m) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- n) Penyelenggaraan publikasi;
- o) Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;

- p) Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- q) Pemberian saran dan Pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan

Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d) Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- e) Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar;
- f) Melakukan urusan gaji pegawai;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, CALK, serta pelaksanaan anggaran;
- h) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, dan Rencana Kinerja Tahunan) dan dokumen penganggaran (Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang;

- i) Melaksanakan koordinasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang;
- j) Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi;
- k) Melaksanakan kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- l) Melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- m) Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan pada Sekretaris; dan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3.3. Bidang Teknis dan Konstruksi

Bidang Teknis dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan kerjasama serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknis dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan Konstruksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Teknis Dan Konstruksi;
- d. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;
- e. Penyusunan analisa harga satuan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- l. Pelaksanaan pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- m. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;
- o. Pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Teknis Dan Konstruksi;
- q. Pelaksanaan administrasi di Bidang Teknis Dan Konstruksi;

- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan Konstruksi dalam laporan kinerja individu;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bidang Teknis dan Konstruksi mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

1) Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan menyusun rencana kerja terkait perencanaan teknis;
- b) Membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c) Melaksanakan survei tentang struktur, kondisi eksisting serta geometri rencana dan gambar;
- d) Melaksanakan pembuatan gambar/desain serta Rencana Anggaran dan Biaya;
- e) Melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen teknis perencanaan;
- f) Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g) Menyusun spesifikasi teknis pekerjaan dan penyusunan analisa harga satuan;
- h) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i) Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi; dan

- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.

2) Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama

Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina jasa konstruksi dan kerjasama;
- b) Membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pelayanan jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama;
- c) Melaksanakan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d) Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (tenaga, sistem informasi, izin usaha dan pembinaan);
- e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain;
- f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.

2.1.3.4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan pengaturan, merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang dan melaksanakan pembinaan Bidang Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan perumusan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Lumajang;
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;
- h. Pelaksanaan koordinasi kerjasama penataan ruang antar-daerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan koordinasi ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;
- j. Pelaksanaan rumusan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan rumusan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;

- l. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tata Ruang;
 - m. Pemberian fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang serta penyelenggaraan Sub. Urusan Bidang Pertanahan lainnya;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang dalam laporan kinerja individu;
 - o. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Bidang Tata Ruang mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

1) Kelompok Sub-substansi Perencanaan Tata Ruang

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait perencanaan tata ruang;
- b) Melaksanakan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- c) Melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang;
- d) Melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi serta Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan;

- e) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten;
- f) Menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang rencana rincian tata ruang;
- g) Melaksanakan pengajuan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang;
- h) Melaksanakan proses permohonan persetujuan substansi untuk Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

2) Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b) Melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c) Melaksanakan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar-daerah Kabupaten;
- d) Melaksanakan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

- e) Melaksanakan ketentuan peraturan zonasi dalam proses pemberian rekomendasi dan informasi tata ruang pada proses permohonan izin untuk bangunan maupun usaha;
- f) Menyiapkan rumusan mengenai penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- g) Menyiapkan rumusan untuk pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
- h) Melaksanakan ketentuan penyediaan layanan sistem informasi tata ruang, *updating* sistem informasi manajemen tata ruang;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan operasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- j) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan ketentuan peraturan zonasi dalam proses pemberian rekomendasi dan informasi tata ruang pada proses permohonan izin untuk bangunan maupun usaha;
- l) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

2.1.3.5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan mengelola data, melaksanakan pembangunan, meningkatkan, merehabilitasi,

memelihara jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. Pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
 - f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
 - h. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bina Marga dalam laporan kinerja individu;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Bidang Bina Marga mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga

Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat bina marga;
- b) Melaksanakan inventarisasi data dan penyusunan *data base* jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang, utilitas, legger pada jalan kabupaten;
- c) Melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- d) Mengoordinasikan terkait jalan nasional, jalan provinsi dan jalan desa;
- e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan rehabilitasi;
- b) Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c) Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

3) Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang

Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemeliharaan dan bangunan penunjang;
- b) Melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- c) Melaksanakan pemeliharaan/preservasi jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

2.1.3.6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sumber Daya Air;

- d. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air ;
- e. Pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air permukaan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air pada air permukaan;
- i. Pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan izin pemanfaatan sumber daya air umum;
- k. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air ;
- m. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sumber Daya Air;
- n. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air dalam laporan kinerja individu;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Bidang Sumber Daya Air mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air

Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat sumber daya air;
- b) Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pendataan, inventarisasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan Bidang Sumber Daya Air;
- c) Memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;
- d) Mengumpulkan dan menganalisa data hidrologi;
- e) Menyiapkan bahan pembinaan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air;
- f) Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air permukaan;
- g) Menyiapkan bahan pengawasan serta pengamanan aset;
- h) Menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, perijinan dan pengamanan aset sumber daya air;
- i) Memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan asset;
- j) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan pengembangan;
- b) Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air;
- c) Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- d) Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- e) Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana air permukaan;
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air permukaan;
- g) Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana irigasi;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasarana pada jaringan irigasi;
- i) Menghimpun data inventarisasi lokasi prasarana dan sarana sumber daya air pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan pengamanan;
- j) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air;

- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

3) Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan

Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait operasi dan pemeliharaan;
- b) Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air;
- c) Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan Operasi Sumber Daya Air;
- d) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Operasi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Operasi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan;
- g) Menyiapkan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- i) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait operasi dan pemeliharaan;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

2.1.3.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:

1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pelayanan peralatan dan operasional.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pelayanan peralatan dan laboratorium;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian sop laboratorium pengujian konstruksi;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang teknis dan konstruksi.

2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan, menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pengelolaan sumber daya air;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan sumber daya air;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran upt pengelolaan sumber daya air;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar dinas;
- e) Melakukan pemantuan dan pengendalian sop pengelolaan sumber daya air;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd pengelolaan sumber daya air;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi penanganan pemeliharaan jaringan jalan, bangunan penunjang jalan, jembatan dan pengamatan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana teknis infrastruktur;
- b) Penyusunan rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan jalan dan jembatan;

- c) Penyusunan kebutuhan anggaran upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- d) Pengoordinasian dengan pihak terkait di luar dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten lumajang;
- e) Pemantauan dan pengendalian sop pengelolaan jalan dan jembatan;
- f) Penyusunan laporan kinerja upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- g) Pemeliharaan fisik yang dianggap darurat atas keberadaan jalan, jembatan dan bangunan penunjang lainnya;
- h) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

2.1.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing. Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Tugas Sub-koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sub-Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
- b. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. Penugasan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui surat perintah tugas.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi Susunan Kepegawaian dan Aset.

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian yang dimiliki untuk mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	240
2	Perempuan	48
Jumlah		288

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kelamin	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	75	10	85

2	Staf Tenaga Kontrak/Honoror	165	38	203
Jumlah		240	48	288

(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honoror)

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Strata 2 (S 2)	1	0	1
2	Strata 1 (S 1)	20	8	28
3	Diploma IV	3	1	4
4	Diploma III	2	0	2
5	Diploma II	0	0	0
6	Diploma I	0	0	0
7	SLTA/SMK	27	1	28
8	SLTP	14	0	14
9	SD	8	0	8
Jumlah		75	10	85

(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honoror)

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	ADUM/ADUMLA / DIKLATPIM TK. IV	4	1	5
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	0	0	0
3	SPAMEN/ DIKLATPIM TK. II	0	0	0
Jumlah		4	1	5

(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honoror)

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Total
-----	----------	--------	-------

		Laki-laki	Perempuan	
1	I	15	0	15
2	II	26	1	27
3	III	34	9	43
4	IV	0	0	0
Jumlah		75	10	85

(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorer)

Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	0	0	0
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	4	0	4
4	Fungsional	10	5	15
5	Staf	57	4	61
Jumlah		75	10	85

2.2.2.Aset

Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang seperti daftar dibawah ini :

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Tetap TA 2022

No.	Pembidangan Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2022)	
		Jumlah	Satuan
1	3	4	5
	Tanah	4004	Bidang
1	Tanah	4004	Bidang
	Peralatan Dan Mesin	1546	Buah / Set
2	Alat Besar	80	Buah / Set
3	Alat Angkutan	108	Buah
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	121	Buah
5	Alat Pertanian	10	Buah / Set
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	769	Buah

No.	Pembidangan Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2022)	
		Jumlah	Satuan
1	3	4	5
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14	Buah
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0	Buah
9	Alat Laboratorium	66	Buah
10	Alat Persenjataan	0	Buah
11	Komputer	378	Buah
12	Alat Eksplorasi	0	Buah
13	Alat Pengeboran	0	Buah
14	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	Buah
15	Alat Bantu Eksplorasi	0	Buah
16	Alat Keselamatan Kerja	0	Buah
17	Alat Peraga	0	Buah
18	Peralatan Proses/Produksi	0	Buah
19	Rambu - Rambu	0	Buah
20	Peralatan Olah Raga	0	Buah
	Gedung Dan Bangunan	114	Buah
21	Bangunan Gedung	99	Buah
22	Monumen	12	Buah
23	Bangunan Menara	1	Buah
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Buah
	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1392	Buah
25	Jalan Dan Jembatan	1059	Buah
26	Bangunan Air	333	Buah
27	Instalasi	0	Buah
28	Jaringan	0	Buah
	Aset Tetap Lainnya	2	Buah / Set
29	Bahan Perpustakaan	0	Buah / Set
30	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	0	Buah / Set
31	Hewan	0	Ekor / Buah
32	Biota Perairan	0	Ekor / Buah
33	Tanaman	0	Ekor / Buah
34	Barang Koleksi Non Budaya	0	Ekor / Buah
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	2	Ekor / Buah
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31	Buah

No.	Pembidangan Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2022)	
		Jumlah	Satuan
1	3	4	5
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31	Buah
TOTAL		7089	Buah/Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Ketentuan lanjut dari pelayanan dasar ini dijelaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2. 9 Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

Dari pelayanan dasar yang terdapat pada PP No. 12 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tersebut di atas, bahwa pelayanan tersebut tidak diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, dan hal ini didukung dengan adanya Perbup No.104 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

Untuk capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang selama periode tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 T-C 23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TAHUN 2019-2020																			
1	Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
1a	Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap proses penerbitan SUJK				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
1b	Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
1c	Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap layanan uji laboratorium				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2a	Luas Wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
2b	Jumlah bangunan yag ber IMB				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
3a	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
3b	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
4	Indeks Kinerja Irigasi				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
4a	Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
4b	Inventarisasi Aset/Barang Daerah				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
5a	Jumlah Jiwa terlayani Infrastruktur Air Minum				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5b	Jumlah Jiwa terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah (B)				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
5c	Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik				0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
TAHUN 2021																			
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	99.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	99.00%	N/A	N/A
1	Indeks Kinerja Irigasi				N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	120.97%	N/A	N/A
1a	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik				N/A	N/A	65.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	78.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	120.97%	N/A	N/A
1b	Prosentase ketersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah kabupaten / kota				N/A	N/A	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	300.00%	N/A	N/A
2	Prosentase panjang jalan kondisi mantap				N/A	N/A	80.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	88.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	110.71%	N/A	N/A
2	Prosentase jembatan kondisi baik				N/A	N/A	91.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	78.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	86.09%	N/A	N/A
2a	Prosentase panjang jalan kondisi mantap				N/A	N/A	80.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	88.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	110.71%	N/A	N/A
2b	Prosentase jembatan kondisi baik				N/A	N/A	91.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	78.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	86.09%	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Prosentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis				N/A	N/A	94.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	93.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	98.94%	N/A	N/A
3a	Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis				N/A	N/A	94.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	93.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	98.94%	N/A	N/A
4	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang				N/A	N/A	40.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	67.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	168.95%	N/A	N/A
4a	Persentase Luas Wilayah Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang				N/A	N/A	15.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	67.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	450.23%	N/A	N/A
4b	Prosentase Redistribusi Tanah				N/A	N/A	3.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	333.33%	N/A	N/A
4c	Prosentase pengelolaan tanah kosong				N/A	N/A	1.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	512.82%	N/A	N/A
TAHUN 2022 - 2023																			
	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	N/A	N/A	N/A	98.89%	39.87%	N/A	N/A	N/A	98.89%	39.87%
1	Indeks Kinerja Irigasi				N/A	N/A	N/A	60.00%	70.00%	N/A	N/A	N/A	66.56%	66.56%	N/A	N/A	N/A	110.93%	95.09%
1a	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik				N/A	N/A	N/A	67.00%	70.00%	N/A	N/A	N/A	66.56%	66.56%	N/A	N/A	N/A	99.34%	95.09%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1b	Prosentase ketersediaan gedung/bangunan Pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota				N/A	N/A	N/A	40.00%	60.00%	N/A	N/A	N/A	53.30%	53.30%	N/A	N/A	N/A	133.25%	88.83%
2	Prosentase jembatan kondisi baik				N/A	N/A	N/A	82.21%	83.21%	N/A	N/A	N/A	88.32%	88.32%	N/A	N/A	N/A	107.43%	106.14%
2	Prosentase panjang jalan kondisi mantap				N/A	N/A	N/A	92.06%	92.56%	N/A	N/A	N/A	92.23%	92.23%	N/A	N/A	N/A	100.18%	99.64%
2a	Prosentase panjang jalan yang terpelihara				N/A	N/A	N/A	82.21%	83.21%	N/A	N/A	N/A	88.32%	88.32%	N/A	N/A	N/A	107.43%	106.14%
2b	Prosentase jumlah jembatan yang terpelihara				N/A	N/A	N/A	92.06%	92.56%	N/A	N/A	N/A	92.23%	92.23%	N/A	N/A	N/A	100.18%	99.64%
3	Prosentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3a	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)				N/A	N/A	N/A	40.00%	60.00%	N/A	N/A	N/A	40.00%	66.00%	N/A	N/A	N/A	100.00%	110.00%
4	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang				N/A	N/A	N/A	45.00%	50.00%	N/A	N/A	N/A	42.68%	42.68%	N/A	N/A	N/A	94.84%	85.36%
4a	Prosentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang				N/A	N/A	N/A	16.12%	17.30%	N/A	N/A	N/A	19.25%	19.25%	N/A	N/A	N/A	119.42%	111.27%
5	Indeks tertib administrasi pertanahan				N/A	N/A	N/A	45.00%	49.00%	N/A	N/A	N/A	80.93%	42.68%	N/A	N/A	N/A	179.84%	87.10%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5a	Prosentase luas tanah yang di redistribusikan				N/A	N/A	N/A	4.00%	6.00%	N/A	N/A	N/A	4.00%	4.00%	N/A	N/A	N/A	100.00%	66.67%

Tabel 2. 11 T-C 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,479,746,070	2,267,550,002	N/A	N/A	N/A	2,255,645,076	2,114,086,597	N/A	N/A	N/A	90.96%	93.23%	N/A	N/A	N/A	-8.56%	-6.28%
POGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,820,756,000	2,816,886,185	N/A	N/A	N/A	1,738,654,170	2,730,741,144	N/A	N/A	N/A	95.49%	96.94%	N/A	N/A	N/A	54.71%	57.06%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,958,000	20,450,000	N/A	N/A	N/A	1,350,000	11,416,000	N/A	N/A	N/A	27.23%	55.82%	N/A	N/A	N/A	312.46%	745.63%
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS	1,431,021,400	1,503,222,000	740,271,470	580,796,300	496,200,000	772,903,500	1,370,826,500	686,270,600	482,965,300	39,362,750	54.01%	91.19%	92.71%	83.16%	7.93%	-20.45%	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	1,163,724,400	1,074,503,400	1,595,659,660	1,245,696,000	1,690,930,300	1,075,588,406	979,181,565	1,546,990,020	1,139,844,408	79,999,023	92.43%	91.13%	96.95%	91.50%	4.73%	13.66%	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	125,137,932,180	89,428,173,500	185,352,522,762	201,736,497,844	80,308,577,270	111,476,304,536	87,418,334,378	84,943,509,599	190,882,739,600	6,260,882,000	89.08%	97.75%	45.83%	94.62%	7.80%	6.84%	0.90%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	18,928,140,700	27,414,248,335	34,854,140,300	23,038,021,460	11,360,700,000	16,956,222,333	26,311,452,353	22,406,978,108	19,611,187,648	726,135,000	89.58%	95.98%	64.29%	85.13%	6.39%	-3.15%	-
POGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	107,000,000	7,000,000	N/A	N/A	N/A	106,680,000	6,750,000	N/A	N/A	N/A	99.70%	96.43%	N/A	N/A	N/A	-93.46%	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN	13,068,107,600	N/A	N/A	N/A	N/A	10,985,193,842	N/A	N/A	N/A	N/A	84.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	13,442,209,809	11,990,715,817	13,306,285,569	N/A	N/A	12,724,532,392	10,802,737,118	2,371,900,523	N/A	N/A	94.66%	90.09%	17.83%	0.09%	-46.57%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	N/A	N/A	10,749,999,774	3,337,204,000	16,820,600,000	N/A	N/A	10,285,690,474	3,142,212,800	170,044,750	N/A	N/A	95.68%	94.16%	1.01%	167.54%	-82.02%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	N/A	N/A	75,173,600	405,000,000	250,000,000	N/A	N/A	71,639,750	392,292,952	3,955,500	N/A	N/A	95.30%	96.86%	1.58%	200.24%	174.30%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	N/A	N/A	261,635,000	N/A	N/A	N/A	N/A	240,496,500	N/A	N/A	N/A	N/A	91.92%	N/A	N/A	0.00%	0.00%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antar masyarakat, antara desa dan kecamatan. Kelompok dan sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yakni seluruh elemen dan lini pengguna layanan infrastruktur dari pengguna jasa dan barang. Sebagai contoh pengguna layanan jasa infrastruktur yakni pelatihan/Bimtek terkait dengan infrastruktur kepada Mandor, penyedia jasa konstruksi, tenaga konstruksi dan masyarakat/perusahaan yang menggunakan layanan penataan ruang SITR dan KKPR. Sasaran layanan infrastruktur bersifat barang seperti masyarakat yang menggunakan layanan jalan kondisi mantap dan reklame serta HIPA/ kelompok tani yang menggunakan layanan irigasi.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pemberian pelayanannya telah melaksanakan serangkaian kemitraan dengan beberapa institusi pemerintahan terkait. Beberapa institusi yang telah melaksanakan kemitraan dengan Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat sebagaimana sesuai dalam lampiran.

2.6. Kerjasama Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang telah melaksanakan serangkaian kerjasama dengan jumlah kerjasama sebagai berikut dengan rincian terdapat pada lampiran:

- Tahun 2018 dilaksanakan 260 kerjasama
- Tahun 2019 dilaksanakan 200 kerjasama
- Tahun 2020 dilaksanakan 602 kerjasama
- Tahun 2021 dilaksanakan 276 kerjasama
- Tahun 2022 dilaksanakan 263 kerjasama

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Renstra Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode 2018 – 2023 terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait bidang bina marga adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor cuaca ekstrim pada saat pelaksanaan kegiatan
2. Permasalahan terkait bidang sumber daya air adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya bencana alam (banjir dan erupsi semeru) di lokasi kegiatan, yang menyebabkan beberapa DI yang awalnya kondisi baik menjadi rusak
3. Permasalahan terkait bidang Teknis Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Pada saat study banding karena terbentur dengan jadwal kegiatan yang lain, sehingga jumlah orang yang ikut tidak sesuai dengan rencana awal
 - b. Ada 1 kegiatan pelatihan yang tidak terlaksana, dikarenakan jumlah personil yang ikut belum memenuhi ambang batas yang telah ditentukan oleh BP2JK wilayah Jatim hingga batas akhir pendaftaran dibuka
4. Permasalahan terkait bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
 - a. Mekanisme penetapan dokumen tata ruang yang memakan waktu lama di tingkat pusat
 - b. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidang tata ruang
 - c. Rendahnya peminat di beberapa bidang tanah pemda yang kurang produktif

Tabel 3. 1 TB 35

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pertumbuhan ekonomi	Rendahnya layanan Infrastruktur Pendukung Perekonomian	<p>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur jalan dan jembatan belum sepenuhnya dalam kondisi baik 2. Pembangunan infrastruktur irigasi masih belum optimal 3. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum optimal 4. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tata ruang 5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan pengajuan informasi tata ruang
Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman	Penurunan kualitas lingkungan hidup	<p>URUSAN PERTANAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan data redistribusi tanah 2. Belum optimalnya pengelolaan lahan kosong dan penatagunaan tanah

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas PUTR diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang di masa 3 tahun mendatang.

Beberapa akar permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan lahan kosong,
2. Kurang optimalnya pembinaan pembangunan dan pengawasan bangunan pemerintah,
3. Kurangnya regulasi perencanaan dan pemanfaatan ruang,
4. Banyak bangunan irigasi yang belum memadai,
5. Banyak jalan dan jembatan dalam kondisi rusak,
6. Belum optimalnya upaya penatagunaan tanah.

BAB VI

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang ingin dicapai di masa mendatang sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2024-2026. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yakni Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Terciptanya Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024-2026 yakni :

- Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
- Meningkatnya konektivitas wilayah
- Meningkatnya kualitas konstruksi
- Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan

Selengkapnya untuk Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024-2026 tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	((Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan) x 100) / 4	86.09	86.79	87.45
	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	(Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik / Total Panjang Jaringan Irigasi) x 100%	67.63	68.30	68.93
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	(Panjang Jalan kondisi mantap / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%	88.82	89.32	89.82

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase jembatan kondisi baik	%	(Jumlah Jembatan Kondisi Baik / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%	92.70	93.17	93.64
	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	%	[(Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung/Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung x 100%) + {Jumlah pelaku jaskon yang mengikuti bimtek atau sosialisasi/Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon x 100%}] / 2	100	100	100
2. Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64.97	65.01	65.05

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	%	$\frac{(\text{Capaian Persentase wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}) + (\text{Capaian Persentase tanah kosong yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase aset pemda yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan})}{4}$	52	57	62

4.2. Cascading Perangkat Daerah

Cascading Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi yang ingin dicapai di masa proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertical (*vertical alignment*), dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$(\text{Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik} / \text{Total Panjang Jaringan Irigasi}) \times 100\%$
Meningkatnya pengelolaan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	%	$\{\text{Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N)} / \text{Total Panjang Jaringan Irigasi (Jar. Irigasi Primer \& Sekunder)}\} \times 100\%$
Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA yang tertangani	Unit	Jumlah Bangunan SDA yang tertangani (Embung dan Danau)
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
Terlaksananya Revitalisasi Danau Penampung Air Alami Lainnya	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Unit	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Beroperasi dan Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangani	KM	Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N)
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
Terbangunnya Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Direhabilitasi
Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi
Meningkatnya konektivitas wilayah		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	Panjang Jalan kondisi mantap / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%
		Persentase jembatan kondisi baik	%	(Jumlah Jembatan Kondisi Baik / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%
Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	%	(Panjang Jalan yang tertangani / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	%	((Jumlah Jembatan tertangani / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang tertangani	km	panjang jalan yang tertangani (Tahun N)

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Jumlah Jembatan yang tertangani	unit	jumlah jembatan yang tertangani (Tahun N)
Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian
Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M2	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan
Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan
Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan
Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Panjang Jalan yang Dibangun
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi
Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
Terbangunnya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	M	Panjang Jembatan yang dibangun
Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala
Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan Jembatan Akibat Bencana	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana
Terlaksananya Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya kualitas konstruksi		Persentase peningkatan kualitas konstruksi	%	$\frac{\{ \text{Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} / \text{Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} \times 100\% \} + \{ \text{Jumlah pelaku jaskon yang mengikuti bimtek atau sosialisasi} / \text{Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon} \times 100\% \}}{2}$
Meningkatnya penataan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	%	$\{ \text{Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} / \text{Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} \} \times 100\%$
Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	$(\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun}) + (\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Dilakukan Rehabilitasi}) + (\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan})$
Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	%	(Jumlah peserta yang mengikuti bimtek atau sosialisasi/Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon) x 100%

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan
Terfasilitasnya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	dokumen	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi
Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi
Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Penyusunan Data dan Informasi ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan		Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	%	(Capaian Persentase wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang) + (Capaian Persentase tanah kosong yang terinventaris) + (Capaian Persentase aset pemda yang terinventaris) + (Capaian Persentase Fasilitas penyelesaian sengketa pertanahan) / 4
Meningkatnya pengelolaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	%	{{(Dokumen RDTR yang ditetapkan/Dokumen RDTR yang dibutuhkan) x100 + (Jumlah KKPR yang dimonev/Jumlah KKPR yang diterbitkan)x100} / 2

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan
Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundang - undangan Bidang Penataan Ruang
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen rencana Tata ruang yg disusun
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah dokumen rencana Tata ruang yg disusun

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi pemanfaatan ruang daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi FPR
Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan yang dihasilkan dari Sistem Informasi penataan Ruang	Dokumen	jumlah jenis data yg diupdate
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris	%	(Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang sudah disusun/Jumlah Kebutuhan Dokumen Tanah Kosong Kecamatan) x 100%
Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan inventaris dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Dokumen	Jumlah Laporan inventaris dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.
Tersedianya data aset pemda yang terinventaris	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase aset pemda yang terinventaris	%	(Jumlah aset Tanah dan Bangunan Pemda yang dipetakan / Jumlah kebutuhan aset Tanah dan Bangunan Pemda Kabupaten Lumajang yang dipetakan) x 100%
Terlaksananya Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Jumlah Dokumen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah	Dokumen	Jumlah Dokumen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	%	(Persentase Konflik tanah yang terfasilitasi / Jumlah total konflik) x 100%
Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Jumlah Data Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Dokumen	Jumlah Data Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan
Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan
Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengenai Strategi dan arah kebijakan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5. 1 TC 26

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terciptanya infrastruktur pendukung perekonomian	1. Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air antara lain melalui peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	• Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
	2. Meningkatnya konektivitas wilayah		• Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
	3. Meningkatnya kualitas konstruksi		
2. Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis, peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan pengelolaan tata ruang	• Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6. 1 TC 27

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang**

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	98.893	100	16,226,971,822	100	16,049,624,689	100	16,725,722,680	100	49,002,319,191
1.03.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	18,458,500	100	19,381,425	100	20,350,496	100	58,190,421

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	4,825,000	3	5,066,250	2	5,319,563	7	15,210,813
1.03.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	2,945,000	1	3,092,250	1	3,246,863	3	9,284,113
1.03.01.2.01.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2	2,945,000	2	3,092,250	2	3,246,863	6	9,284,113

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.01.04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1,088,750	1	1,143,188	1	1,200,347	3	3,432,284
1.03.01.2.01.05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1,088,750	1	1,143,188	1	1,200,347	3	3,432,284

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	2,620,000	5	2,751,000	5	2,888,550	15	8,259,550
1.03.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	9	2,946,000	9	3,093,300	9	3,247,965	27	9,287,265
1.03.01.2.02	Terpenuhiya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	7,699,882,614	100	8,084,876,745	100	8,489,120,582	100	24,273,879,941
1.03.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88/12	88/12	7,559,943,614	88/12	7,937,940,795	88/12	8,334,837,834	264/36	23,832,722,243

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.02.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	136,704,000	12	143,539,200	12	150,716,160	36	430,959,360
1.03.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	3,235,000	1	3,396,750	1	3,566,588	3	10,198,338
1.03.01.2.03	Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	91.144	100	2,686,533,600	100	510,033,800	100	510,535,490	100	3,707,102,890
1.03.01.2.03.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	1,612,000	2	1,692,600	2	1,777,230	6	5,081,830

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.03.02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	911	1445	2,676,977,600	177	500,000,000	177	500,000,000	1799	3,676,977,600
1.03.01.2.03.04	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2	5,547,000	2	5,824,350	2	6,115,568	6	17,486,918
1.03.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	2,397,000	2	2,516,850	2	2,642,693	6	7,556,543
1.03.01.2.05	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	%	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	84,002,000	100	253,066,100	100	265,719,405	100	602,787,505

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.05.02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1	80,000,000	1	84,000,000	1	88,200,000	3	252,200,000
1.03.01.2.05.03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	3	1,116,000	3	1,171,800	3	1,230,390	9	3,518,190
1.03.01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	2	2,886,000	2	3,030,300	2	3,181,815	6	9,098,115
1.03.01.2.05.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	0	-	10	164,864,000	10	173,107,200	20	337,971,200
1.03.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	1,014,648,128	100	1,075,280,534	100	1,129,044,561	100	3,218,973,224

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.06.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	14,681,800	1	15,415,890	1	16,186,685	3	46,284,375
1.03.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	226,727,900	3	238,064,295	3	249,967,510	9	714,759,705
1.03.01.2.06.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	3	104,954,178	3	110,201,887	3	115,711,981	9	330,868,046
1.03.01.2.06.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	N/A	0	-	1	3,900,000	1	4,095,000	2	7,995,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.06.07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2	149,186,250	2	156,645,563	2	164,477,841	6	470,309,653
1.03.01.2.06.08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	0	-	12	6,000,000	12	6,300,000	24	12,300,000
1.03.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	4	519,098,000	4	545,052,900	4	572,305,545	12	1,636,456,445
1.03.01.2.07	Terpenuhiya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	790,558,100	100	2,078,836,005	100	2,182,777,805	100	5,052,171,910
1.03.01.2.07.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	254,190,000	1	266,899,500	1	280,244,475	3	801,333,975
1.03.01.2.07.03	Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A	0	-	1	1,248,750,000	1	1,311,187,500	2	2,559,937,500

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Disediakan											
1.03.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	58	536,368,100	58	563,186,505	58	591,345,830	174	1,690,900,435
1.03.01.2.08	Terpenuhiya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100	100	1,905,224,000	100	2,000,485,200	100	2,100,509,460	100	6,006,218,660
1.03.01.2.08.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	744,000	12	781,200	12	820,260	36	2,345,460
1.03.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	374,900,000	12	393,645,000	12	413,327,250	36	1,181,872,250

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	12	1,529,580,000	12	1,606,059,000	12	1,686,361,950	36	4,822,000,950
1.03.01.2.09	Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100	100	2,027,664,880	100	2,027,664,880	100	2,027,664,880	100	6,082,994,640
1.03.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	83	415,024,880	84	435,776,124	85	457,564,930	85	1,308,365,934
1.03.01.2.09.03	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	16	160,640,000	16	168,672,000	16	177,105,600	16	506,417,600

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107	144	202,000,000	146	212,100,000	148	222,705,000	148	636,805,000
1.03.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	5	1,250,000,000	5	1,312,500,000	5	1,378,125,000	15	3,940,625,000
1.03.01.2.09.10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	0	-	5	660,000,000	5	693,000,000	10	1,353,000,000
1.03.02	Meningkatnya pengelolaan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	%	{Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N) / Total Panjang Jaringan Irigasi (Jar. Irigasi Primer & Sekunder)} x 100%	1.99	1.92	31,970,803,000	2.01	26,381,331,750	2.11	24,550,398,338	2.11	82,902,533,088

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.01	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan SDA yang tertangan i	Unit	Jumlah Bangunan SDA yang tertangani (Embung dan Danau)	N/A	2	1,205,382,000	2	3,527,639,700	1	554,021,685	5	5,287,043,385
1.03.02.2.01.06	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	N/A	0	-	1	3,000,000,000	0	-	1	3,000,000,000
1.03.02.2.01.45	Terlaksananya Revitalisasi Danau Penampung Air Alami Lainnya	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Unit	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	N/A	1	502,514,000	1	527,639,700	1	554,021,685	3	1,584,175,385
1.03.02.2.01.66	Beroperasinya Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A	1	702,868,000	0	-	0	-	1	702,868,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.02	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangan i	KM	Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N)	9.39	9.04	30,765,421,000	9.49	22,853,692,050	9.97	23,996,376,653	28.50	77,615,489,703
1.03.02.2.02.01	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	N/A	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	3	472,875,000
1.03.02.2.02.02	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	N/A	0.36	450,000,000	0.38	472,500,000	0.40	496,125,000	1.13	1,418,625,000
1.03.02.2.02.03	Terbangunnya Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	N/A	1	9,000,000,000	0	-	0	-	1	9,000,000,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.02.08	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	N/A	1.85	3,000,000,000	1.94	3,150,000,000	2.04	3,307,500,000	5.832125	9,457,500,000
1.03.02.2.02.09	Meningkatnya Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	N/A	3	600,000,000	3	630,000,000	3	661,500,000	9	1,891,500,000
1.03.02.2.02.14	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10.16	6.83	8,835,963,000	7.17	9,277,761,150	7.53	9,741,649,208	21.531575	27,855,373,358
1.03.02.2.02.21	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Direhabilitasi	2.76	4.84	8,509,458,000	5.08	8,934,930,900	5.34	9,381,677,445	15.2581	26,826,066,345
1.03.02.2.02.27	Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	8.00	8	220,000,000	8	231,000,000	8	242,550,000	24	693,550,000
1.03.08	Meningkatnya penataan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	%	(Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung/Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung) x 100%	53.33	100	10,795,600,000	100	11,335,380,000	100	11,902,149,000	100	34,033,129,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03.08.2.01	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	(Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun) + (Jumlah Bangunan Gedung yang Dilakukan Rehabilitasi)+(Jumlah Bangunan Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan)	4	6	10,795,600,000	6	11,335,380,000	6	11,902,149,000	18	34,033,129,000
01.03.08.2.01.02	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	11	6	10,045,600,000	6	10,547,880,000	6	11,075,274,000	18	31,668,754,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03.08.2.01.04	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	173	160	100,000,000	160	105,000,000	160	110,250,000	480	315,250,000
01.03.08.2.01.12	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	N/A	1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,500,000	3	630,500,000
01.03.08.2.01.13	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	N/A	3	450,000,000	3	472,500,000	3	496,125,000	9	1,418,625,000
1.03.10	Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	%	(Panjang Jalan yang tertangani / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%	4.94	3.46	109,215,445,510	3.46	97,029,033,250	3.46	99,880,484,913	3.46	206,244,478,949

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	%	((Jumlah Jembatan tertangani / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%	0.24	3.53	19,535,130,407	3.53	20,511,886,927	3.53	21,537,481,274	3.53	40,047,017,379
1.03.10.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan dan jembatan Kabupaten	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang tertangani	km	panjang jalan yang tertangani (Tahun N)	54.84	62.95	109,215,445,510	62.95	97,029,033,250	62.95	99,880,484,913	188.84	206,244,478,949
			Jumlah Jembatan yang tertangani	unit	jumlah jembatan yang tertangani (Tahun N)	1	15	19,535,130,407	15	20,511,886,927	15	21,537,481,274	45.00	40,047,017,379
1.03.10.2.01.01	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengendalian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian	1	255	1,090,025,000	255	1,144,526,250	255	1,201,752,563	765	3,436,303,813
1.03.10.2.01.02	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M2	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	0	200	95,540,000	200	100,317,000	200	105,332,850	600	301,189,850

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03. 10.2. 01.03	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	0	8	200,000,000	7	210,000,000	12	220,500,000	27	630,500,000
1.03. 10.2. 01.04	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	6	600,000,000	6	630,000,000	6	661,500,000	18	1,891,500,000
1.03. 10.2. 01.05	Terbangunnya Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Panjang Jalan yang Dibangun	1.63	0.67	2,000,000,000	0.67	2,100,000,000	0.67	2,205,000,000	2.01	6,305,000,000
1.03. 10.2. 01.08	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	38.176	16.56	25,080,000,000	16.56	26,334,000,000	16.56	27,650,700,000	49.7	79,064,700,000
1.03. 10.2. 01.09	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	17	21.09	67,463,480,510	21.09	53,189,470,000	21.09	53,848,943,500	63.26	174,501,894,010
1.03. 10.2. 01.11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	22	12.60	12,186,400,000	12.23	12,795,720,000	12.23	13,435,506,000	37.07	38,417,626,000
1.03. 10.2. 01.12	Terbangunnya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	M	Panjang Jembatan yang dibangun	31	56.6	17,035,130,407	56.6	17,886,886,927	56.6	18,781,231,274	169.8	53,703,248,608
1.03. 10.2. 01.18	Terehabilitasinya Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	N/A	10	1,000,000,000	10	1,050,000,000	10	1,102,500,000	30	3,152,500,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			si											
1.03.10.2.01.20	Terpeliharaan Jembatan Secara Berkala	Pemeliharaan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	N/A	15	750,000,000	15	787,500,000	15	826,875,000	45	2,364,375,000
1.03.10.2.01.21	Terehabilitasinya/ Terekonstruksinya Jalan Jembatan Akibat Bencana	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	N/A	1	500,000,000	1	525,000,000	1	551,250,000	3	1,576,250,000
1.03.10.2.01.27	Terlaksananya Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung	Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/ Direhabilitasi	N/A	1	750,000,000	1	787,500,000	1	826,875,000	1	2,364,375,000
01.03.11	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	%	(Jumlah peserta yang mengikuti bimtek atau sosialisasi/ Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon) x 100%	40	100	780,261,300	100	819,274,365	100	860,238,083	100	2,459,773,748
01.03.11.2.01	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi	5	133	203,662,000	178	213,845,100	213	224,537,355	524	642,044,455

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03 .11.2. 01.03	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	N/A	4	8,200,000	4	8,610,000	4	9,040,500	12	25,850,500
01.03 .11.2. 01.04	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	N/A	25	91,336,000	35	95,902,800	45	100,697,940	105	287,936,740
01.03 .11.2. 01.06	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	150	3	4,026,000	3	4,227,300	3	4,438,665	9	12,691,965

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03 .11.2. 01.07	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	N/A	105	96,500,000	140	101,325,000	165	106,391,250	410	304,216,250
01.03 .11.2. 01.08	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	dokumen	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi	N/A	6	3,600,000	6	3,780,000	6	3,969,000	18	11,349,000
01.0 3.11. 2.02	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi	7	6	256,599,500	6	269,429,475	6	282,900,949	18	808,929,924

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03 .11.2. 02.02	Tersedianya Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	7	4	30,000,000	4	31,500,000	4	33,075,000	12	94,575,000
01.03 .11.2. 02.03	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	N/A	3	4,999,500	3	5,249,475	3	5,511,949	9	15,760,924
01.03 .11.2. 02.07	Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaan Material dan Peralatan	Penyusunan Data dan Informasi ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	N/A	2	221,600,000	2	232,680,000	2	244,314,000	6	698,594,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03.11.2.04	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	N/A	16	319,999,800	21	335,999,790	26	352,799,780	63	1,008,799,370
01.03.11.2.04.01	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	N/A	1	270,000,000	1	283,500,000	1	297,675,000	3	851,175,000
01.03.11.2.04.02	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	N/A	45	35,000,000	60	36,750,000	90	38,587,500	195	110,337,500

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03 .11.2. 04.03	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Laporan	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	N/A	15	14,999,800	20	15,749,790	25	16,537,280	60	47,286,870
1.03. 12	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	%	{{(Dokumen RDTR yang ditetapkan/Dokumen RDTR yang dibutuhkan) x100 + (Jumlah KKPR yang dimonev/Jumlah KKPR yang diterbitkan)x100} / 2	19.24	64	2,514,509,500	69	2,940,234,975	73	3,087,246,724	73	8,541,991,199
1.03. 12.2. 01	Ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan	4	3	750,000,000	3	987,500,000	3	1,036,875,000	9	2,774,375,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.12.2.01.01	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	1	0	-	1	100,000,000	1	105,000,000	2	205,000,000
1.03.12.2.01.02	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR	1	2	600,000,000	2	630,000,000	2	661,500,000	6	1,891,500,000
1.03.12.2.01.03	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	1	0	-	1	100,000,000	1	105,000,000	2	205,000,000
1.03.12.2.01.04	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	1	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	3	472,875,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.12.2.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah dokumen rencana Tata ruang yg disusun	1	2	1,352,364,000	2	1,519,982,200	2	1,595,981,310	6	4,468,327,510
1.03.12.2.02.01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	1	0	-	1	100,000,000	1	105,000,000	2	205,000,000
1.03.12.2.02.02	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah dokumen rencana Tata ruang yg disusun	N/A	2	1,352,364,000	2	1,419,982,200	2	1,490,981,310	6	4,263,327,510
1.03.12.2.03	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi pemanfaatan ruang daerah	N/A	12	298,000,000	12	312,900,000	12	328,545,000	36	939,445,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03. 12.2. 03.01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi FPR	N/A	12	223,000,000	12	234,150,000	12	245,857,500	36	394,062,500
1.03. 12.2. 03.02	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan yang dihasilkan dari Sistem Informasi penataan Ruang	Dokumen	jumlah jenis data yg diupdate	N/A	1	75,000,000	1	78,750,000	1	82,687,500	3	75,000,000
1.03. 12.2. 04	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	N/A	12	114,145,500	12	119,852,775	12	125,845,414	36	359,843,689

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03. 12.2. 04.04	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	N/A	12	114,145,500	12	119,852,775	12	125,845,414	36	359,843,689
2.10. 08	Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris	%	(Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang sudah disusun/ Jumlah Kebutuhan Dokumen Tanah Kosong Kecamatan) x 100%	N/A	4.76	100,000,000	9.52	105,000,000	14.28	110,250,000	14.28	315,250,000
2.10. 08.2. 02	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	Dokumen	Jumlah Laporan inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	N/A	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,250,000	3	315,250,000
2.10. 08.2. 02.01	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota yang Diinventarisasi.	N/A	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,250,000	3	315,250,000
2.10. 13	Tersedianya data aset pemda yang terinventaris	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase aset pemda yang terinventaris	%	(Jumlah aset Tanah dan Bangunan Pemda yang dipetakan / Jumlah kebutuhan aset Tanah dan Bangunan Pemda Kabupaten Lumajang yang dipetakan) x 100%	N/A	43	255,000,000	52	267,750,000	62	281,137,500	62	803,887,500

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.13.7.01	Terlaksananya Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	Jumlah Dokumen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah	Dokumen	Jumlah Dokumen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah	N/A	2	255,000,000	2	267,750,000	2	281,137,500	6	803,887,500
2.10.13.7.01.01	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/ Pemda	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/ Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/ Pemda	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/ Pemda	N/A	2	255,000,000	2	267,750,000	2	281,137,500	6	803,887,500
2.10.17	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	%	(Persentase Konflik tanah yang terfasilitasi / Jumlah total konflik) x 100%	N/A	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000	100	157,625,000
2.10.17.7.01	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Jumlah Data Penyelesaian Konflik- Konflik	Dokumen	Jumlah Data Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	N/A	2	50,000,000	2	52,500,000	2	55,125,000	6	157,625,000

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pertanahan											
2.10.17.7.01.01	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	N/A	2	50,000,000	2	52,500,000	2	55,125,000	6	157,625,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024-2026 untuk sebagaimana Tabel 7.1 memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dimuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD sebagaimana Tabel 7.2

7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 tersaji pada Tabel 7.1.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	((Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan) x 100) / 4	86.09	86.79	87.45
	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	(Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik / Total Panjang Jaringan Irigasi) x 100%	67.63	68.30	68.93
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	(Panjang Jalan kondisi mantap / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%	88.82	89.32	89.82

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase jembatan kondisi baik	%	(Jumlah Jembatan Kondisi Baik / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%	92.70	93.17	93.64
	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	%	[(Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung/Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung x 100%) + {Jumlah pelaku jaskon yang mengikuti bimtek atau sosialisasi/Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon x 100%}] / 2	100	100	100
2. Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64.97	65.01	65.05

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	%	$\frac{(\text{Capaian Persentase wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}) + (\text{Capaian Persentase tanah kosong yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase aset pemda yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan})}{4}$	52	57	62

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tersaji pada Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7. 2 TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	((Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan) x 100) / 4	85.40	86.09	86.79	87.45	87.45
2	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	(Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik / Total Panjang Jaringan Irigasi) x 100%	66.56	67.63	68.30	68.93	68.93

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya pengelolaan irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	%	{Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N) / Total Panjang Jaringan Irigasi (Jar. Irigasi Primer & Sekunder)} x 100%	1.99	1.92	2.01	2.11	2.11
4	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	(Panjang Jalan kondisi mantap / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%	88.32	88.82	89.32	89.82	89.82
		Persentase jembatan kondisi baik	%	(Jumlah Jembatan Kondisi Baik / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%	92.23	92.70	93.17	93.64	93.64

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	%	$(\text{Panjang Jalan yang tertangani} / \text{Total Panjang Jalan kabupaten}) \times 100\%$	4.94	5.68	5.68	5.68	5.68
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	%	$((\text{Jumlah Jembatan tertangani} / \text{Total Unit Jembatan kabupaten}) \times 100\%$	0.24	3.53	3.53	3.53	3.53
6	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	%	$[\{\text{Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} / \text{Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} \times 100\% \} + \{\text{Jumlah pelaku jaskon yang mengikuti bimtek atau sosialisasi} / \text{Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon} \times 100\% \}] / 2$	N/A	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatnya penataan bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	%	$\frac{\{\text{Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung}\}}{\text{Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung}} \times 100\%$	53.33%	100	100	100	100
8	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	%	$\frac{\{\text{Jumlah peserta yang mengikuti bimtek atau sosialisasi}\}}{\text{Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon}} \times 100\%$	40%	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64.65	64.97	65.01	65.05	65.05
10	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	%	$(\text{Capaian Persentase wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}) + (\text{Capaian Persentase tanah kosong yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase aset pemda yang terinventaris}) + (\text{Capaian Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan}) / 4$	42.68	52	57	62	62

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	%	$\{(Dokumen\ RDTR\ yang\ ditetapkan/Dokumen\ RDTR\ yang\ dibutuhkan)\ x100 + (Jumlah\ KKPR\ yang\ dimonev/Jumlah\ KKPR\ yang\ diterbitkan)x100\} / 2$	19.24	64	69	73	73
12	Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	Persentase tanah kosong yang terinventaris	%	$(Jumlah\ Dokumen\ Tanah\ Kosong\ yang\ sudah\ disusun/Jumlah\ Kebutuhan\ Dokumen\ Tanah\ Kosong\ Kecamatan) \times 100\%$	N/A	4.76	9.52	14.28	14.28

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Tersedianya data aset pemda yang terinventaris	Persentase aset pemda yang terinventaris	%	(Jumlah aset Tanah dan Bangunan Pemda yang dipetakan / Jumlah kebutuhan aset Tanah dan Bangunan Pemda Kabupaten Lumajang yang dipetakan) x 100%	N/A	43	52	62	62
14	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	%	(Persentase Konflik tanah yang terfasilitasi / Jumlah total konflik) x 100%	N/A	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	98.893	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan dirinci dalam program tahunan yang memuat rencana kegiatan dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis diharapkan menjadi acuan bagi masing-masing bidang dan Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam hal penyusunan program kerja dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Teknis dan Konstruksi serta Bidang Tata Ruang yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan seperti yang diharapkan, maka masing-masing Bidang dan Sekretariat harus melakukan fungsi koordinasi dan partisipasi secara internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsinya serta fungsi pemantauan dan penyusunan sejauh tahap persiapan sampai pasca pelaksanaan, sehingga Rencana Strategis ini dapat berfungsi dan berkembang sesuai kebutuhan untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Secara umum, di dalam Rencana Strategis ini dapat diketahui bahwa kendala yang timbul adalah terbatasnya dana pembangunan, lokasi yang sulit terjangkau dan luasnya wilayah serta kurang berfungsinya koordinasi lintas sector terksit dengan instansi di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, dinamika masyarakat serta faktor alamiah geografis, dimana salah satu upaya pemecahannya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dalm rangka pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Teknis dan Konstruksi dan Bidang Teknis dan Konstruksi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan masyarakat Lumajang pada umumnya.

Lumajang, 2 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.Si, M.T
NIP. 19810817 201001 1 032